

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
TAHUN 2025  
( LKPJ )**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian sehingga laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi capaian dalam tahun 2025.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan pemerintahan yang baik, Aamiin.

Benteng, 05 Maret

KEPALA DINAS,



Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805211996031009

## DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Gambaran Umum DP3AP2KB .....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tufoksi .....	2
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat struktural .....	6
<b>BAB II. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
2.1 Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan .....	8
2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pel. Program, Kegiatan & Sub Kegiatan .....	8
2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU.....	19
2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan .....	20
2.1.4 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	23
2.1.5 Inovasi .....	24
2.1.6 Prestasi dan penghargaan .....	24
2.2 Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, & Keputusan Bupati yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah.....	25
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati TA. 2025 .....	26

## **BAB III. PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk

mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **1.2. STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

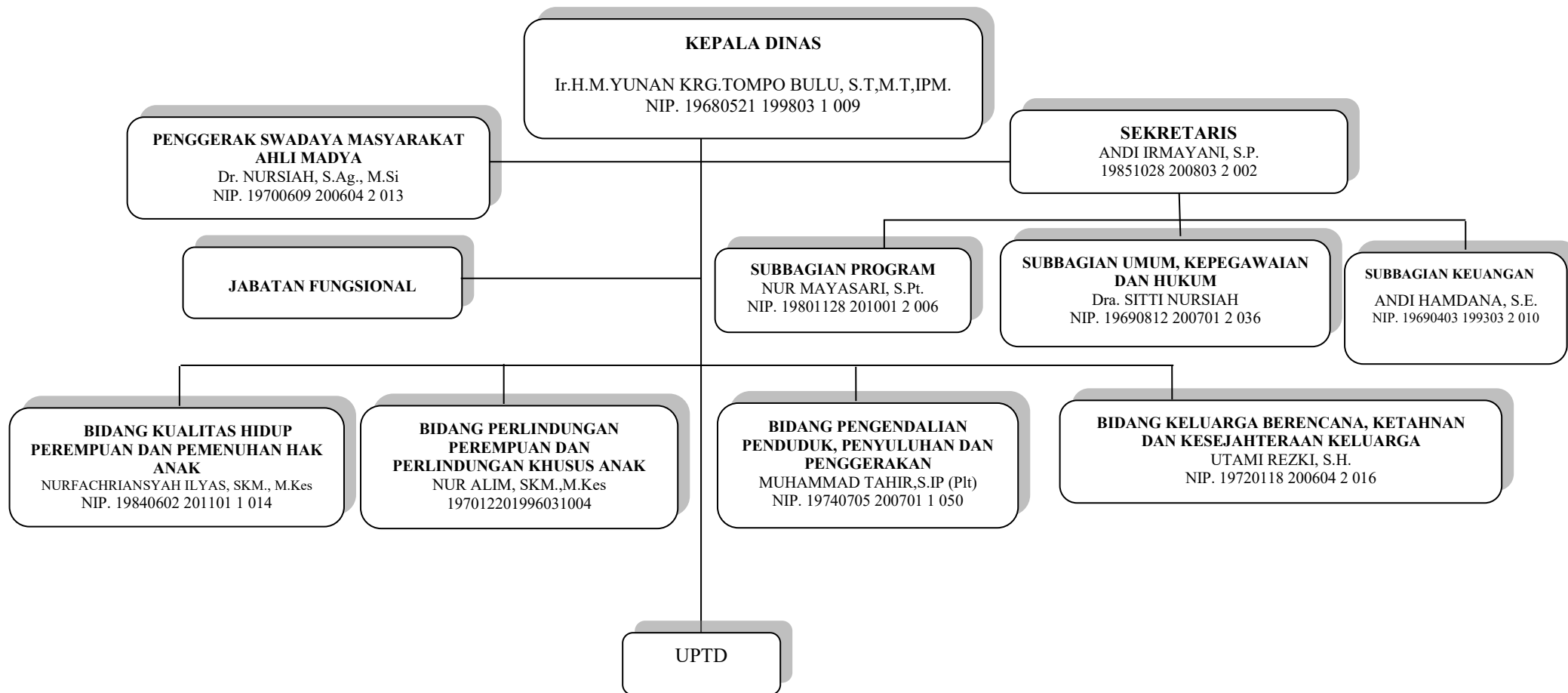
### **1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub. Bagian Program
  2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
  3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- VII. UPTD
- VIII. Jabatan Fungsional;

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



## 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

**1.3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN,  
PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL**

**Tabel. 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara**

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPOBULU, S.T.,M.T.,IPM Nip. 19680521 199803 1 009	Kepala Dinas DP3AP2KB	
2	Ir. ANDI IRMAYANI, S.P.,M.M Nip. 19851028 200803 2 002	Sekretaris Dinas DP3AP2KB	
3	UTAMI REZKI, SH Nip. 19720118 2000604 2 016	Kabid. KB, Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga	
4	NUR ALIM, SKM.,M.Kes Nip. 19701220 199603 1 004	Kabid. Perlindungan Perempuan & Perlindungan Khusus Anak	
5	NURFACHRIANSYAH ILYAS, SKM.,M.Kes Nip. 19840602 201101 1 014	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan & Pemenuhan Hak Anak	
6	MUHAMMAD TAHIR, S.IP Nip. 19740705 200701 2 050	Plt. Kepala Bidang Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
7	Dra. SITTI NURSIAH Nip. 19690812 200701 2 036	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	
8	NUR MAYASARI, S.Pt Nip. 19801128 201001 2 006	Kepala Sub. Bagian Program	
9	ANDI HAMDANA, SE Nip. 19690403 199303 2 010	Kepala Sub. Bagian Keuangan	
10	MUHAMMAD IRVAN, S.T Nip. 19820805 201101 1 012	Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan dan Wilayah VII)	
11	RUDI AMAL, S.Sos Nip. 19700301 201001 1 007	Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan dan Wilayah I)	
12	YUSRIADI, SE Nip. 19801106 201001 1 003	Kasubag. TU UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB Wilayah VII	
13	ANDI BAU OPU, S.M. Nip. 19721226 200701 2 012	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
14	RISNAWATI DP,S.IP Nip. 19840511 201407 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan	
15	MASLINDA, SE Nip. 19760116 200701 2 017	Kasubag. TU UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB Wilayah II	
16	HUSNI LAEGO, S.Sos Nip. 19880122 202203 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	

17	SILVY SUTRI INSANI ASIS, S.Sos Nip. 19970307 202203 2 009	Penelaah Teknis Kebijakan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
18	NURSYAMSI, S.Sos Nip. 19980411 202203 2 011	Analisis Perlindungan Perempuan	
19	HARTATI Nip. 19690204 200906 2 001	Pengadministrasi Keuangan	
20	SYAMSIRAWATI Nip. 19830710 200903 2 003	Pengadministrasi Kepegawaian	
21	Hj. NURNIATI. A Nip. 19700425 199003 2 006	Pengadministrasi Umum	
22	SITTI NURAENI Nip. 19680303 199103 2 019	Pengadministrasi Umum	
23	MUHAMMAD KASIM, A.Md Nip. 19780328 201212 1 001	Pengelola Data dan Informasi UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB Wilayah V	
24	KAMIRUDDIN Nip. 19770815 200906 1 001	Pengelola Kepegawaian	
25	GAZALI Nip. 19730608 200906 1 001	Pengadministrasi Kepegawaian	
26	SUHARMIYANI, S.STP Nip. 19911107 201206 2 001	Fungsional Analisis Kebijakan	
27	Dr. NURSIAH, S.Ag., M.Si Nip. 19700609 200604 2 013	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	
28	IRNAWATI, S.Pi Nip. 19831019 201101 2 012	Fungsional Analisis Kebijakan	
29	ANDI OPU, SE Nip. 19740104 200701 2 015	Fungsional Penata Kependudukan & KB Muda	
30	MULIATI, SE Nip. 199208182025052001	Perencana Ahli Pertama	
31	CITRA DEWI, S.Sos Nip. 200202042025052002	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
32	IRMAWATI, S.Sos Nip. 200207282025052002	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
33	ANDI SOFIYANTI, S.Ag Nip. 19770308 201101 2 008	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
34	DARMAWATI, SH Nip. 19730314 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
35	NURNIAH. M, AMKL Nip. 19730405 200604 2 024	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
36	ROSDIANA, S.Ag Nip. 19730117 201101 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec.	Pegawai Pusat

		Bontomate'ne	
37	SUWARSI NOVIANTI, SE Nip. 19800307 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
38	AMBO RAPPE. M Nip. 19760912 201001 1 012	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kec. Pastim	Pegawai Pusat
39	ANDI TAWAKKAL Nip. 19820621 201410 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
40	ASMARANI Nip. 19721219 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec, Bontomanai	Pegawai Pusat
41	BAHYANI Nip. 19700109 201212 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
42	MULIATI, SE Nip. 19920818 202505 2 001	Perencana Ahli Pertama	Pegawai Pusat
43	MUHAMMAD ANSAR Nip. 19740702 201407 1 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	
44	NASMAWATI Nip. 19701008 201407 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
45	RAHMIATI Nip. 19820329 200801 2 021	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
46	SUPARMAN, SP Nip. 19800130 201502 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontosikuyu	Pegawai Pusat
47	SURYANI Nip. 19680513 201410 2 002	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
48	JUMRAWATI, S.Sos Nip. 197205172022212001	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
49	SABDA ALAM, SKM Nip. 199104202022211002	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
50	MUSLIADI, S.E Nip. 199102242022211003	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
51	ANDI TAZKIR SAIFUL, S.Pd Nip. 198207012022211001	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
52	SULASTRI, S.IP Nip. 199103312022212001	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
53	ANDI ULFAWATI REZKI, A.Md.Keb Nip. 199201032022212008	PKB Terampil	P3K BKKBN Provinsi

54	WIWI APRIANI, A.Md.Keb. Nip. 199404102022212005	PKB Terampil	P3K BKKBN Provinsi
55	ANDI GUNAWAN, ST Nip. 198707312023211018	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
56	NURJAYANI, S.Pd.I Nip. 19740624 202321 2 008	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
57	NUR MAYA Nip. 199712052024212009	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
58	SYAMSUL BAHRI, S.IP Nip. 199312292023211020	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
59	ERMI SAHARA Nip. 19771026 2024212002	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
60	AKMAL, S.Sos Nip. 198009092023211010	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
61	ILHAM, S.Sos Nip. 198110022023211008	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
62	MARWANTI, S.Pd Nip. 199509162023212045	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
63	ISMAIL, S.P Nip. 198503082023211016	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
64	ISNAWATI Nip. 197003082024212001	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
65	SELVA ATRIANI KALSUM SUDMAYADI Nip. 199009192024212005	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
66	NIRMAWATI Nip. 198407092024212002	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
67	TALLASIANG Nip. 197706252024212001	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
68	SITTI HUBAYA Nip. 198301302024212001	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
69	NURHAERANI Nip. 197911192024212014	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi

70	BURHANUDDIN, SE Nip. 197701092024211005	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
71	MULKIYAH SYAHMI, S.Tr.Keb Nip. 199209082023212045	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
72	ISRAWATI IDRIS, SP NI P3K PW. 198510212025212065	Penata Layanan Operasional	P3K PW
73	ITA SAHARA, SE NI P3K PW. 199001212025212067	Penata Layanan Operasional	P3K PW
74	JUMRIATI, SE NI P3K PW. 198304232025212039	Penata Layanan Operasional	P3K PW
75	FAJRIANI, SE NI P3K PW. 199109032025212102	Penata Layanan Operasional	P3K PW
76	NUR NENENG SAFITRI, S.Pd NI P3K PW. 199108162025212075	Penata Layanan Operasional	P3K PW
77	NELLY HAMDANA, S.Sos NI P3K PW. 198806202025212081	Penata Layanan Operasional	P3K PW
78	SITTI AISAH NI P3K PW. 197705052025212038	Operator Layanan Operasional	P3K PW
79	KASMIATI, S.A.P NI P3K PW. 199011062025212116	Penata Layanan Operasional	P3K PW
80	RIDAWATI, A.Md NI P3K PW. 198109292025212029	Pengelola Layanan Operasional	P3K PW
81	MUHAMMAD IKBAL, S.Pd NI P3K PW. 198707132025211135	Penata Layanan Operasional	P3K PW
82	FITRIANI NI P3K PW. 198008122025212073	Operator Layanan Operasional	P3K PW
83	RESTIA YULIANA, S.A.P NI P3K PW. 199810012025212047	Penata Layanan Operasional	P3K PW
84	SRI WAHYUNI. S NI P3K PW. 199806012025212060	Operator Layanan Operasional	P3K PW
85	HIJRANA. R, S.Pd NI P3K PW. 197910242025212019	Penata Layanan Operasional	P3K PW
86	BASNIA, S.A.P NI P3K PW. 199811232025212061	Penata Layanan Operasional	P3K PW
87	DESY SELFIANI, SKM NI P3K PW. 199512042025212118	Penata Layanan Operasional	P3K PW
88	RISKA ASTRIWANA KARIM NI P3K PW. 200111302025212026	Operator Layanan Operasional	P3K PW
89	DESI YULIANA PUTRI NI P3K PW. 199906092025212085	Operator Layanan Operasional	P3K PW
90	SATRIANI, S.Pd NI P3K PW. 198312092025212052	Penata Layanan Operasional	P3K PW
91	NUR INSANA, S.Kep. NS NI P3K PW. 199201072025212133	Penata Layanan Operasional	P3K PW
92	RAHMATIAH	Operator Layanan	P3K PW

	NI P3K PW. 197410242025212018	Operasional	
93	ANUGRAH PUTRA, S.Kom NI P3K PW. 199212202025212242	Penata Layanan Operasional	P3K PW
94	CITRAWATI NI P3K PW. 198510072025212079	Operator Layanan Operasional	P3K PW
95	DARMAWATI NI P3K PW. 197606102025212037	Operator Layanan Operasional	P3K PW
96	ROSNANI NINGSI NI P3K PW. 107804152025212036	Operator Layanan Operasional	P3K PW
97	NIRWANA NI P3K PW. 199804142025212084	Operator Layanan Operasional	P3K PW
98	NUR ABIDIN JAMAL NI P3K PW. 108610132025211075	Operator Layanan Operasional	P3K PW
99	NURMUFIDAH NI P3K PW. 198207122025212080	Operator Layanan Operasional	P3K PW
100	ANDI JUMRIATI NI P3K PW. 196802072025212005	Operator Layanan Operasional	P3K PW
101	ANDI ZULFIANA NI P3K PW. 198112112025212032	Operator Layanan Operasional	P3K PW
102	NOFALIA NI P3K PW. 198906052025212105	Operator Layanan Operasional	P3K PW
103	BAU NARRU NI P3K PW. 197401122025212027	Operator Layanan Operasional	P3K PW
104	NASRULLAH NI P3K PW. 198904222025211087	Operator Layanan Operasional	P3K PW
105	PEDI KRISTAL FIKRAM NI P3K PW. 199105272025211079	Operator Layanan Operasional	P3K PW
106	ILYA RAHAYU NI P3K PW. 200205172025212022	Operator Layanan Operasional	P3K PW
107	MULIATI NI P3K PW. 197606212025212016	Operator Layanan Operasional	P3K PW
108	MUSDALIFAH NI P3K PW. 198411252025212051	Operator Layanan Operasional	P3K PW
109	NUR INTANG NI P3K PW. 197406152025212026	Operator Layanan Operasional	P3K PW
110	ROSMALINA NI P3K PW. 197902282025212034	Operator Layanan Operasional	P3K PW
111	SUTARTINA NI P3K PW. 197208072025212011	Operator Layanan Operasional	P3K PW

**Tabel. 2. Data Kualifikasi Pendidikan**

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S3	1
2	S2	3
3	S1	20
4	D III	2
5	SMA	6

**Tabel. 3. Pangkat dan Golongan**

No	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. 1 (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata Tk. 1 (III/d)	11
5	Penata (III/c)	3
6	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	2
7	Penata Muda (III/a)	9
8	Pengatur Tk. 1 (II/d)	2
9	Pengatur (II/c)	1
10	Pengatur (II/b)	0
11	Pengatur Muda (II/a)	0
Jumlah		32

**Tabel. 4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jabatan	Struktural	Fungsional	Ket.
Eselon II/a	0 orang		
Eselon II/B	1 orang		
Eselon III/A	1 orang		
Eselon III/B	3 orang		
Eselon IV/A	7 orang		
Eselon IV/B	2 orang		

Fungsional	5 Orang	14 Orang PNS Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
		24 Orang P3K Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
Pelaksana	13 orang		
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	

DP3AP2KB mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

## BAB II

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### 2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN T.A 2025

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	100%	81, 89%			
					<b>763.0481.000</b>	<b>6.248.307.587</b>			
1	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>	<b>RKPD TAHUN 2025</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	100%	<b>92,91</b>			
					<b>4.415.351.000</b>	<b>4.102.152.610</b>			
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	100%	<b>75,44</b>			
					<b>3.958.266.000</b>	<b>3.654.062.910</b>			
				<b>Kegiatan :</b>	<b>100%</b>	<b>96,31</b>			
				<b>Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.223.100</b>	<b>13.698.558</b>			
				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	97,89			
					9.587.100	9.384.614			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	88,55			

					1.120.500	992.206			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100	88,19			
					606.200	534.594			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100	88,19			
					303.100	267.297			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100	97,89			
					606.200	593.397			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		100	96,32			
					2.000.000	1.926.450			
			<b>Kegiatan :</b>		100%	<b>92,75</b>			
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>3.153.652.400</b>	<b>2.925.004.173</b>			
			<b>Sub Kegiatan :</b>						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	92,63			
					3.065.183.000	2.839.187.331			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100	97,05			
					87.659.000	85.073.942			
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100	91,67			
					810.400	742.900			
			<b>Kegiatan :</b>		100%	<b>100</b>			

				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.810.000</b>			
				<b>Sub. Kegiatan</b>					
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	100			
					3.810.000	3.810.000			
				<b>Kegiatan :</b>	100	<b>100</b>			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4.453.800</b>	<b>4.453.800</b>			
				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100			
					4.453.800	4.453.800			
				<b>Kegiatan :</b>	100%	92,84			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>201.391.700</b>	<b>186.975.200</b>			
				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	53,18			
					3.204.000	1.704.000			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	26,86			
					9.037.000	2.427.000			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	76,99			
					18.467.700	14.218.400			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	88,64			
					3.300.000	2.925.000			

Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	95,13			
	6.900.000	6.564.000			
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	99,16			
	160.438.000	159.136.800			
<b>Kegiatan :</b>	100	88,63			
<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>31.500.000</b>	<b>27.919.500</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	88,63			
	31.500.000	27.919.500			
<b>Kegiatan :</b>	<b>100</b>	<b>93,15</b>			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>342.742.000</b>	<b>319.248.698</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	78,39			
	88.630.000	69.480.698			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	98,29			
	254.112.000	249.768.000			
<b>Kegiatan :</b>	<b>100</b>	<b>83,76</b>			
<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>206.439.000</b>	<b>172.952.981</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>					

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	99,94			
					43.705.000	43.678.121			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	87,87			
					119.258.000	104.786.960			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	64,68			
					18.260.000	11.810.400			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	100	50,17			
					25.270.000	12.677.500			
				<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>100</b>	<b>99,48</b>			
					362.950.000	361.050.000			
				<b>Kegiatan :</b>	100	85,33			
				<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota</b>	12.950.000	11.050.000			
				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	85,33			
					12.950.000	11.050.000			
				<b>Kegiatan :</b>	100	100			

			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	350.000.000	350.000.000			
			<b>Sub Kegiatan :</b>					
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100			
				350.000.000	350.000.000			
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			
				0	0			
			<b>Kegiatan :</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			
			<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	0	0			
			<b>Sub Kegiatan :</b>					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	0			
			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	100	93,81			
				7.274.200	6.824.200			
			<b>Kegiatan :</b>	<b>100</b>	<b>93,81</b>			
			<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	7.274.200	6.824.200			
			<b>Sub Kegiatan :</b>					

				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	93,81			
					7.274.200	6.824.200			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>100</b>	<b>79,75</b>			
					9.836.000	7.843.800			
				<b>Kegiatan :</b>	<b>100</b>	<b>81,21</b>			
				<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	9.836.000	7.843.800			
				<b>Sub Kegiatan :</b>	<b>100</b>	<b>81,21</b>			
				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.836.000	7.843.800			
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	100	88,39			
					145,000,300	128,170,400			
				<b>Kegiatan :</b>	<b>100</b>	<b>86,64</b>			
				<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota</b>	<b>32.112.800</b>	<b>27.821.200</b>			
				<b>Sub Kegiatan :</b>	<b>100</b>	<b>86,64</b>			
				Penguatan Kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kab/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Sesa/Kel. Layak Anak dan DRPPA	<b>32.112.800</b>	<b>27.821.200</b>			
				<b>Kegiatan :</b>	<b>100</b>	<b>99,20</b>			

				<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>100</b>	<b>99,20</b>			
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.912.000	44,550.500			
					44.912.000	44,550.500			
2	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	<b>RKPD 2025</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	100	66,75			
					<b>7,913,612,300</b>	<b>5,230,998,218</b>			
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	100	99,05			
					708.000.000	701.266.710			
				<b>Kegiatan :</b>	100	99,05			
				<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	708.000.000	701.266.710			
				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100	99,81			
					648.000.000	646.800.000			
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	100	90,78			
					60.000.000	54.466.710			
				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	100	38,89			
	1.715.255.000	667.084.955							
<b>Kegiatan :</b>	100	55,63							
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>791.254.000</b>	<b>440.196.075</b>							

				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	100	63,95			
					416.354.000	266.265.077			
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	100	18,81			
					174.900.000	32.900.000			
				Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100	99,06			
					100.000.000	99.059.998			
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	100	41,97			
					100.000.000	41.971.000			
				<b>Kegiatan :</b>	100	0			
				<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>142.550.000</b>	<b>0</b>			
				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	<b>142.550.000</b>	<b>0</b>			
				<b>Kegiatan :</b>	100	81,24			
				<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	286.167.000	149.560.000			
				<b>Sub Kegiatan :</b>					

				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	78,39			
					39.722.000	31.140.000			
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	100	43,33			
					208.195.000	90.220.000			
				Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	67,12			
					28.250.000	18.960.000			
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100	92,40			
					10,000,000	9.240.000			
				<b>Kegiatan :</b>	100	15,61			
				<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>495.284.000</b>	<b>77.328.880</b>			
				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	100	6,67			
					292.500.000	19.500.000			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	100	28,52			

					202.784.000	57.828.880			
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	100	98,22			
					<b>791.875.000</b>	<b>777.803.312</b>			
				<b>Kegiatan :</b>	100	98,22			
				<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga</b>	<b>791.875.000</b>	<b>777.803.312</b>			
				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	100	89,30			
					130.000.000	116.093.779			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK_R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	100	99,98			
					661.875.000	661.709.533			

### 2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DP3AP2KB

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,367	0,44	119,90	Pengampu : Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan hak Anak
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,95	107,8	117,23	Pengampu : Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan hak Anak
3.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	60,74	60,74 (2023)	100	Pengampu : Bidang Perlindungan perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
4.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)	%	63,95	65,78	102,86	Pengampu : Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

### 2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2025 DP3AP2KB

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	1. Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
2	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	1. Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun		2,05	1,7	82,92	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	2. Persentase Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	%	56,15	64,50	114	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,30	8	65,04	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN  
DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DP3AP2KB**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Rp. 7.630.481.000,-	Rp 6.248.307.587,-	Rp 1.382.173.413,-	81,89	9			
	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak</b>	Rp. 4.415.351.000,-	Rp 4.102.152.610,-	Rp 313.198.390,-	92,91	6	6,46	15	16,15
	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	Rp . 3.215.130.000,-	Rp. 2.146.154.977,-	Rp. 1.068.975.023,-	66,76	3	4,50	6	8,99

### 2.1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	-	-	-	

### 2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2023		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
2.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2024		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	

## 2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1.	FORUM ANAK DAERAH TANADOANG SILAJARA TAHUN 2025-2027	No. 337/VI/TAHUN 2025 Tanggal, 11 Juni 2025	Pembentukan Forum Anak Daerah Tanadoang Silajara Tahun 2025 - 2027	Tujuannya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Selayar	
2.	Fasilitator Pembekalan Kelompok Kerja di Kampung Keluarga Berkualitas pada Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Tahun Anggaran 2025	No. 400.13/023/IV/TAHUN 2024 Tanggal, 02 April 2025	Penunjukan Fasilitator Pembekalan Kelompok Kerja di Kampung Keluarga Berkualitas pada Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Tahun Anggaran 2025	Tujuannya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembekalan pokja Kampung Keluarga Berkualitas pada kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Tahun Anggaran 2025	
3.	Rumah Data Kependudukan Desa Patikarya sebagai Rujukan Rumah Data Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar	Nomor 400.13.50/038/XI/2025/DP3AP2KB Tanggal, 13 November 2025	Penunjukan Rumah Data Kependudukan Desa Patikarya sebagai Rujukan Rumah Data Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar	Tujuannya untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang akurat dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Kepulauan Selayar	
4	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	No. 382/VII/TAHUN 2025, Tanggal, 02 Juli 2025	Pembentukan Tim Pelaksana serta penunjukan Narasumber dan moderator Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	Tujuannya untuk meningkatkan kualitas keluarga Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	
5	Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar	No. 672/XII/TAHUN 2025, Tanggal, 03 Desember 2025	Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Tujuannya untuk memastikan peta jalan Pembangunan Kependudukan diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, RKPD dan Rencana Kerja SKPD.	

**2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>No.</b>	<b>Rekomendasi DPRD</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	-	-	-

### BAB III

### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi lembaga yang dibuat setiap tahun anggaran berakhir dan bertujuan untuk perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.

Permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah terbatasnya sarana dan prasarana kantor, jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Desa dan Kecamatan.

Untuk mengantisipasi kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada namun, tetap mengusahakan sarana prasarana yang layak dan memadai. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikutkan berbagai pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dengan adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami menyadari penyusunan LKPJ ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan penyusunan LKPJ ini.

Benteng, 05 Maret 2026

KEPALA DINAS,



Ir. H. M. YUNAN KRIG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805211998031009

